BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Strategi pembangunan yang berpusat pada rakyat memiliki tujuan (Harry, 2000) untuk memperbaiki kualitas hidup rakyat berkaitan dengan aspirasi individu dan kolektif, dalam tradisi budaya- perilaku kebiasaan yang berlaku. Sehingga kota perlu mengembangkan program yang tanggap kebutuhan sosial, termasuk dalam hal melakukan penataan kawasan kumuh. Penataan kawasan kumuh di kawasan perkotaan memiliki beberapa kendala, salah satunya adalah terkait pemahaman standar permukiman yang layak. Selain itu faktor fungsional permukiman juga terkait dengan dimensi sosial, ekonomi, budaya, teknologi, ekologi bahkan politik (Suprijanto, 2004).

Kehidupan yang menjadi dambaan masyarakat adalah kondisi yang sejahtera.[1] Masalah permukiman kumuh memang sangat terasa sekali di kota kota besar di Indonesia.Menurut catatan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), jumlah penduduk dalam kategori miskin di wilayah perkotaan menjadi 10,49 juta jiwa pada tahun 2017. Mereka menempati kawasan kumuh seluas 38.431 hektare dengan jumlah rumah mencapai 7,6 juta rumah. Usaha pemerintah dalam menangani permukiman kumuh (slum area). Salah satunya dilakukan dengan program Kotaku. Hal tersebut tertulis dalam Surat Edaran Kementrian PUPR No.

[1]Soetomo. 2010. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahaannya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

40/SE/DC/2016 tentang pedoman umum program Kota Tanpa Kumuh.[2] Sebagai implementasi percepatan penanganan kumuh, Program Kotaku akan melakukan peningkatan kualitas, pengelolaan serta pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru, dengan kegiatan-kegiatan pada entitas desa/kelurahan, serta kawasan dan kabupaten/kota. Kegiatan penanganan kumuh ini meliputi pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi untuk keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh.[3]

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Dalam tujuan umum tersebut terkandung dua maksud. Pertama, memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan. Kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, berbasis masyarakat, dan partisipasi pemerintah daerah.[4]

Di Kota Gorontalo, diidentifikasi kawasan kumuh seluas 159,3 Hektare (Ha) terdapat di enam kelurahan, yaitu kawasan Kelurahan Biawu-Biawao (2 kelurahan), Kelurahan Limba B, Kelurahan Bugis, Kelurahan Ipilo dan Kelurahan Siendeng. Namun setelah dilakukan identifikasi ulang, terdapat 2 kelurahan yang memiliki kawasan kumuh, yakni kawasan Leato Selatan dan Kelurahan Leato Utara di Kecamatan Dombo Raya, yang letaknya di daerah pesisir. Di sisi lain,

---

[2] Surat Edaran Kementrian PUPR No. 40/SE/DC/2016, diakses pada tanggal 12 november 2019
[3]http://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku, di akses pada tanggal 12 november 2019
[4]http://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku, di akses pada tanggal 12 november 2019

Kota Gorontalo yang menjadi lokasi proritas penanganan kawasan kumuh adalah Kawasan Laberger.[5] yang berada di Kelurahan Limba B. Kawasan ini berada di pusat kota dengan kondisi sangat jorok, sehingga perlu ditata secara lebih baik dan bersih. Ini adalah amanah Undang-undang dan tanggung jawab Pemda. Untuk itu, semua kawasan penataan kumuh daerah Gorontalo diakomodir dalam RPJMD Kota Gorontalo. Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan dan Peningktan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah seperangkat regulasi atau aturan yang sangat diperlukan dalam rangka menuju kawasan bebas kumuh tahun 2019 sebagai dasar untuk melakukan penataan kawasan kumuh tersebut. Fakta yang ada sebelum ada regulasi, tidak dinafikkan bahwa upaya penanganan kumuh masih bersifat parsial karena belum adanya regulasi yang mengatur.[6]

Permukiman kumuh belakangan ini menjadi suatu fenomena sosial cukup penting dalam kehidupan Kota Besar dan Kota berkembang di Indonesia. Kehadiran mereka yang tinggal di kawasan kumuh sering kali dianggap sebagai cermin kemiskinan Kota atau suatu kegagalan adaptasi kelompok orang tertentu terhadap kehidupan dinamis Kota Besar. Pemahaman tentang bagaimana kehidupan mereka, seperti apa kegiatan dan aspirasi yang mereka milik, keteraitan dengan kepemilikan tempat tinggal, hubungan dengan pihak dan orang-orang yang ada di sekitar lingkungan hidup mereka memungkinkan kita menempatkan mereka secara lebih bijaksana dalam konteks permasalahan kehidupan Kota Besar.

---

[5] Julukan untuk kawasan kumuh yang berada di kelurahan limba B.
[6]http://kotaku.pu.go.id/view/3862/rapat-konsensus-kota-gorontalo:-benahi-kota-rumah-kita-bersama di akses pada tanggl 12 november 2019

Program kotaku itu sudah berjalan di kawasan tersebut dan sampai sekarang. Tetapi dalam tahap observasi awal penulis menemukan beberapa masalah yang di hadapi oleh msyarakat yang tinggal di kawasan laberger tersebut dimana harapan dari masyarakat tentang penangan kumuh dan untuk kesejahteraan mereka dengan apa yang pemerintah sedang kembangkan di kawasan tersebut. Ada perbedaan harapan dan tujuan antara masyarakat yang tinggal di kawasan laberger dengan pemerintah. Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi program kotaku dalam penanganan kawasan pemukiman kumuh di kelurahan Limba B, Kota Gorontalo.

Merujuk pada observasi awal, diketahui bahwa Kondisi lngkungan sebelum adanya program, dimana lingkungan di RT 01/ RW 01 kelurahan limba b di katakan kumuh, masyarakat merasa resah ketika hujan turun, karena di kawasan tersebut sering tergenang air akibat dari drainase air yang tidak ada. Sebagian masyarakat masih ada yang membuang hajat di saluran air karena tidak tersedianya jamban, kondisi rumah yang semi permanen yang berhimpitan, jalan yang sedikit rusak. terdapat tempat masak, wc dan tempat untuk menjemur pakaian yang di bangun di atas saluran air besar. Beberapa tahun belakangan kawasan kumuh di jalan tengah berangsur-angsur menunjukan perubahannya entah itu dari segi penataan tempat tinggal dan lingkungan sekitar tetapi itu belum semua tersentuh dengan penataan dari pemerintah karena jika dlihat dari tempat tinggal mereka masih berhimpitan. Setelah adanya program KOTAKU kondisi lingkungan yang dulunya sering tergenang air sekarang di bangun drainase, penyediaan jamban gratis bagi setiap rumah, perbaikan jalan paving, masyarakat

mendapat bantuan rehab rumah. Sekarang masyarakat bisa merasakan perubahan yang terjadi dengan adanya program. Masyarakat mersepon dengan baik adanya program KOTAKU yang sudah beberapa tahun belakangan ini berjalan, sebagian masyarakat bisa merasakan perubahan yang terjadi di kawasan kumuh tempat tinggal mereka dengan adanya kepedulian pemerintah membantu masyarakat lewat program KOTAKU ini. Program KOTAKU berjalan sesuai dengan apa masyarakat butuhkan, dari rehab rumah, pembuatan jamban, perbaikan jalan, dan saluran air. Terutama yang paling di butuhkan perbaikan rumah walaupun ada sebagian yang belum mendapat bantuan tersebut. Untuk hambatan dalam implementasi program KOTAKU, dalam pembangunan ada beberapa yang tidak sesuai dengan apa yang masyarakat harapkan, contohnya dalam program yang sekarang berlangsung di kawasan tersebut yaitu pembangunan saluran air dalam mengurangi banjir dan jalur pedestrian.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang peneliti akan di teliti yaitu :

1.2.1 Bagaimana kondisi lingkungan di jalan Teuku Umar II RT 01/ RW 01 kelurahan Limba B dengan adanya Program Kotaku.

1.2.2 Bagaimana perubahan kualitas hidup penduduk di jalan Teuku Umar II RT 01/ RW 01 kelurahan limba B dengan adanya program kotaku.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk mengetahui tentang kondisi lingkungan di jalan Teuku Umar II RT 01/ RW 01 kelurahan Limba B dengan adanya program kotaku.

1.3.2 Untuk mengetahui perubahan kualitas hidup penduduk di jalan Teuku Umar II RT 01/ RW 01 kelurahan limba B dengan adanya program kotaku.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Sebagai referensi bagi pembaca dan untuk mengetahui masalah sosial yang terjadi di Kota Gorontalo khususnya Kawasan Pemukiman Kumuh.

1.4.2 Menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota dalam mengambil kebijakan tentang penanganan kawasan pemukiman kumuh.